



**THE 11th FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

**ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN**  
**(Studi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan A set Daerah**  
**Kabupaten Magetan)**

<b>Puspa Dam ayanti<sup>1</sup></b> <b>Pendidikan Akuntansi FKIP</b> <b>Universitas PGRI Madiun</b> <b>damayantipuspa27@gmail.com</b>	<b>Isharijadi<sup>2</sup></b> <b>Pendidikan Akuntansi FKIP</b> <b>Universitas PGRI Madiun</b> <b>Isharijadi57@gmail.com</b>
<b>Nur Wahyuning Sulistyowati<sup>3</sup></b> <b>Pendidikan Akuntansi FKIP</b> <b>Universitas PGRI Madiun</b> <b>nurwahyu@unipma.ac.id</b>	

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan seperti derajat desentralisasi, rasio ke mandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan pajak daerah, serta pertumbuhan pendapatan. Penelitian dilakukan di BPPKAD Kabupaten Magetan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi menunjukkan kriteria kurang. Rasio kemandirian keuangan daerah bersifat instruktif. Rata-rata rasio efektivitas bisa mencapai target, sedangkan efektivitas pajak daerah menunjukkan hasil yang sangat efektif. Dan pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan.

**PENDAHULUAN**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dilakukan adanya perubahan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh roda pemerintahan. Kewenangan yang dimaksud adalah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah harus bisa mengatur roda pemerintahan sehingga dapat dinilai efektif dan efisien. Selain itu keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan juga sangat diperlukan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut agar angka ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa berkurang.

Penelitian terdahulu Pilat dan Morasa (2017) bahwa kemandirian Pemerintah Kota Manado berada pada kemampuan instruktif yaitu kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dan belum memenuhi kebutuhan dana untuk pen

pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan social masyarakat dan peran pemerintah pusat masih sangat dominan. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan terbilang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Daling (2013) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Pemkab Minahasa Tenggara masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi. Pemerintah Kabupaten Minahasa terus melakukan perbaikan kualitas dan hasil untuk menunjang program untuk memajukan daerah agar terjadi proses percepatan pembangunan dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Untuk efektivitas pajak daerah tahun 2009 menunjukkan presentase kurang dari 100% yang menunjukkan bahwa belum



**THE 11th FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

efektif. Sedangkan tahun 2011 133,39% hal tersebut berarti sangat efektif karena melebihi 100%. Pada tahun 2010 justru mengalami penurunan atau kurang dari 100%, hal tersebut berarti bahwa belum tercapainya target yang telah ditentukan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miartana dan Hardiyasa (2016) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Bali menunjukkan bantuan pemerintah pusat yang kecil yang artinya bahwa telah mandiri dan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Untuk rasio efektivitas keuangan daerah sudah di atas target yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Miartana dan Hardiyasa diperoleh bahwa kinerja keuangan menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun ke tahun, dan pemerintah daerah berhasil dalam mengatur serta mengurus pemerintahan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Penelitian Natalia dan Astuti (2015) yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman untuk efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya presentase yang ditunjukkan pada tahun 2012 termasuk ke dalam kategori sangat efektif karena presentase mencapai 111,46%. Sedangkan untuk ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi, hal tersebut terjadi karena sebagian besar pendapatan belum didominasi oleh PAD.

Menurut Mursyidi (2009:44) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan langkah membandingkan hasil pencapaian atau realisasi dengan anggaran. Dari hasil yang telah didapatkan bisa dinilai bagaimana kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah daerah. Sehingga hasil dari analisis laporan ini dapat digunakan sebagai gambaran atas kinerja yang telah dilaksanakan. Menurut Mahmudi (2016:134) analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio kemandirian daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, dan rasio efektivitas pajak daerah.

Menurut Mahmudi (2016:134) analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio kemandirian daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, dan rasio efektivitas pajak daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan penyajian laporan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Laporan keuangan tersebut berisikan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Namun dalam kenyataannya tidak semua pengguna laporan keuangan bisa memahami laporan keuangan tersebut, untuk memudahkan dalam memahaminya maka perlu dibantu dengan analisis rasio keuangan.

Menurut Rasida (2013) Magetan memiliki letak geografis yang strategis, letaknya yaitu berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kabupaten



**THE 11th FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

Magetan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan pariwisata di Karesidenan Madiun. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain, Kabupaten Magetan lebih memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah.

Pemerintah terus menggali potensi yang ada di Kabupaten Magetan agar produktifitas terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah bisa bertambah. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung sehingga merupakan penyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan berasal dari sektor pariwisata. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan (2018) produktivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan terlihat bahwa dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, tahun 2015 sebesar Rp 164,564,899,426.30, tahun 2016 sebesar Rp 165,617,751,404.46, dan tahun 2017 adalah sebesar Rp 212,806,288,638.89.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magetan saat ini adalah belum terwujudnya misi Kabupaten Magetan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut tercermin dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat biayanya belum sepenuhnya berasal dari daerah melainkan didominasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Agar lebih jelasnya bagaimana ketergantungan yang terjadi yang ada di Kabupaten Magetan maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan di Kabupaten Magetan jika dilihat dari derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan pengetahuan dalam bidang analisis rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja keuangan pada suatu daerah dalam periode tertentu. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi sejauh mana tingkat pencapaian kinerja, sehingga pemerintah bisa terus meningkatkan kinerjanya agar semakin meningkat dari periode-periode sebelumnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif postpositivisme yaitu meneliti sesuai dengan keadaan di objek penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya tanpa memanipulasi data yang hasilnya menekankan pada sebuah makna. Creswell (dalam Sugiyono 2013:228) menyebutkan bahwa “penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang mencakup mulai dari membuat pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data atau menginterpretasikan data sehingga terdapat makna dari suatu data”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Menurut Moleong (2014:321) keabsahan data merupakan sebuah konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan konsep keandalan (reabilitas). Dalam penelitian kualitatif salah satu cara yang digunakan

untuk mengecek keabsahan data yaitu uji kredibilitas yang berupa triangulasi sumber. Menurut Prastowo (2016:269) triangulasi sumber adalah suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber. Keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, yaitu dengan cara pemeriksaan atau membandingkan dengan sumber lainnya.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran yang di dalamnya memuat antara anggaran yang dibuat pada awal perencanaan program dan realisasi atau pencapaiannya pada akhir kegiatan yang telah terlaksana. Berikut adalah ringkasan penyajian laporan realisasi anggaran pada pos pendapatan.

##### A. Ringkasan Anggaran

Tabel 1. Ringkasan Anggaran

Anggaran (Rp)

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	164,564,899,426.30	165,615,614,256.82	212,806,288,638.89
Pendapatan Transfer Lain-lain yang Sah	1,375,763,632,136.00	1,471,395,742,864.00	1,524,802,021,915.00
Pendapatan	4,598,782,000.00	33,342,919,060.00	20,284,600,000.00
Jumlah	1,544,927,313,562.3	1,670,354,276,180.8	1,757,892,910,553.8

Sumber: Data primer diolah peneliti (2018)

##### B. Ringkasan

Realisasi Tabel

##### 2. Ringkasan

Realisasi

Realisasi (Rp)

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	150,000,000,000.00	156,133,450,134.00	193,686,220,710.00
Pendapatan Transfer	1,449,561,432,253.00	1,666,026,870,346.00	1,537,859,072,902.36
Pendapatan Lain-lain yang Sah	2,037,249,000.00	24,096,557,072.00	21,657,600,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,601,598,681,253.00</b>	<b>1,846,256,877,552.00</b>	<b>1,753,202,893,612.36</b>

Sumber: Data primer diolah peneliti (2018)

Analisis rasio keuangan yang dilakukan di BPPKAD Kabupaten Magetan dalam penelitian ini merupakan suatu proses dalam menilai terkait tingkat pencapaian pelaksanaan tujuan BPPKAD Kabupaten Magetan di bidang keuangan untuk tahun 2015-2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Magetan pada penelitian ini adalah derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan pajak daerah, serta pertumbuhan pendapatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang didapatkan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan. Dari data tersebut bisa diketahui kinerja keuangan Kabupaten Magetan. Di bawah ini adalah hasil dari perhitungan analisis rasio tersebut:

#### 1. Derajat Desentralisasi

Tabel 3. Perhitungan Derajat Desentralisasi

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	%	Kemampuan Keuangan
2015	Rp164,564,899,426.30	Rp1,544,927,313,562.30	10.6520	Kurang
2016	Rp 165,617,751,404.46	Rp1,670,356,413,328.46	9.9151	Sangat Kurang
2017	Rp 212,806,288,638.89	Rp1,757,892,910,553.89	12.1058	Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magetan diolah peneliti (2018)

Berdasarkan data di atas bahwa derajat desentralisasi pada tahun 2015 dalam kategori kurang, hal tersebut menunjukkan bahwa total PAD sebesar Rp164,546,899,426.30 dari pendapatan daerah yang Rp1,544,927,313,562.30 jika dipresentasikan yaitu 10,6520%. Untuk tahun 2016 berada dalam kategori kurang dikarenakan mengalami penurunan, presentase yaitu 9.915% dengan PAD sebesar Rp165,617,751,404.46 dari total pendapatan daerah Rp1,670,356,413,328.46. Selanjutnya tahun 2017 mengalami kenaikan ditunjukkan dengan angka 12.1058% dari PAD Rp212,806,288,638.89 dan total pendapatan daerah Rp1,757,892,910,553.89. Dari ketiga hasil yang ditunjukkan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab pembangunan atau pelaksanaan desentralisasi yang diberikan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih kurang, karena presentase masih berada dikisaran 10%.

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Transfer	%	Pola Hubungan
		Pusat+Prov+Pinjaman		
2015	Rp164,546,899,426.30	Rp1,375,763,632,136.00	11.9604	Instruktif
2016	Rp165,617,751,404.46	Rp1,471,395,742,864.00	11.2558	Instruktif
2017	Rp212,806,288,638.89	Rp1,524,802,021,915.00	13.9563	Instruktif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magetan diolah peneliti (2018)

Dari tabel di atas terlihat jika PAD tahun 2015 presentase sebesar 11.9604% dari PAD Rp164,546,899,426.30 dan pendapatan transfer Rp1,375,763,632,136.00, untuk tahun 2016 presentase sebesar 11.2558% dari PAD Rp165,617,751,404.46, sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp1,471,395,742,864.00. Presentase tahun berikutnya atau 2017 13.9563%, dengan kata lain mengalami kenaikan PAD yaitu Rp212,806,288,638.89, dan pendapatan transfer Rp1,524,802,021,915.00. Pola hubungan selama tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa presentase masih sekitar 0-25%, atau pola hubungan instruktif yaitu bahwa kemandirian pemerintah daerah masih rendah sekali, hal tersebut dikarenakan peran pemerintah pusat masih dominan terhadap pemerintah daerah. Meskipun pada tahun 2017 PAD mengalami peningkatan, namun juga diikuti dengan tingginya bantuan dari pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya maksimalnya pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada di Kabupaten Magetan. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan bahwa sebagian besar pendapatan masih didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pemerintah

pusat maupun pemerintah provinsi, sehingga tingkat kemandirian relatif rendah.

### 3. Rasio Efektifitas PAD

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektifitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	%	Kriteria
2015	Rp164,564,899,426.30	Rp150,000,000,000.00	109.7099	Sangat Efektif
2016	Rp165,617,751,404.46	Rp156,133,450,134.00	106.0745	Sangat Efektif
2017	Rp212,806,288,638.89	Rp193,686,220,710.00	109.8717	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magetan diolah peneliti (2018)

Tabel di atas menunjukkan tingkat efektivitas dari PAD tahun 2015-2017 di Kabupaten Magetan. Pada tahun 2015 kriteria menunjukkan bahwa sangat efektif dengan persentase 109.7099%, dimana realisasi PAD adalah Rp164,546,899,426.30 dari target penerimaan PAD Rp150,000,000.00. Tahun 2016 adalah 109.8717%, dari realisasi Rp165,617,751,404.46, sedangkan target penerimaan adalah Rp156,133,450,134.00, tahun 2017 kriterianya adalah sangat efektif dikarenakan persentase lebih dari 100% atau realisasi penerimaan bisa lebih besar daripada target yang telah ditentukan. Efektivitas PAD dikatakan sangat efektif apabila didapatkan hasil yang melebihi 100%, hal itu menunjukkan bahwa sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dari hasil wawancara yang didapatkan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah juga sudah mencapai target yang telah ditetapkan atau melebihi 100%.

### 4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	%	Kriteria
2015	Rp164,564,899,426.30	Rp150,000,000,000.00	109.7099	Sangat Efektif
2016	Rp165,617,751,404.46	Rp156,133,450,134.00	106.0745	Sangat Efektif
2017	Rp212,806,288,638.89	Rp193,686,220,710.00	109.8717	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magetan diolah peneliti (2018)

Dari tabel di atas menunjukkan sejauh mana efektifitas PAD, yakni perbandingan antara target dengan realisasi pada tahun yang bersangkutan. Tahun 2015 mempunyai kriteria yang sangat efektif, hal tersebut menunjukkan

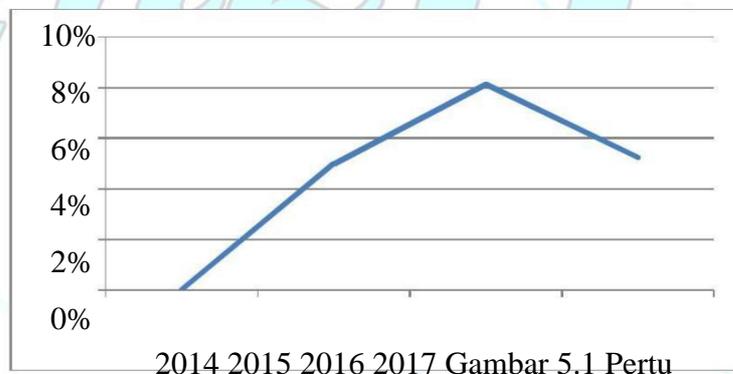
bahwa persentase yang didapatkan lebih dari 100%, yakni 109.7099%. Sedangkan untuk tahun 2016 menunjukkan persentase sebesar 106.0745%, termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2017 menunjukkan kriteria yang sangat efektif, yaitu melebihi 100% atau sebesar 109,8717%. Dalam kriteria yang sangat efektif hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah telah mencapai anggaran yang sudah ditetapkan.

5. Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 7. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Pendapatan Th t	Pendapatan Th (t-1)	%
2014	Rp1,471,812,527,966.69	Rp0.00	0.0000
2015	Rp1,544,927,313,562.30	Rp1,471,812,527,966.69	4.9677
2016	Rp1,670,356,413,328.46	Rp1,544,927,313,562.30	8.1188
2017	Rp1,757,892,910,553.89	Rp1,670,356,413,328.46	5.2406

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magetan diolah peneliti (2018)



Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan diperoleh dari pendapatan Th t dikurangi dengan pendapatan Th (t-1) kemudian dibagi dengan pendapatan Th (t-1). Dari tabel di atas diketahui hasil dari pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Magetan. Tahun 2015 pertumbuhan pendapatan 4.9677% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah nominal

pendapatan yaitu Rp1, 544,927,313,562.30. Sedangkan tahun 2016 pendapatan sebesar Rp Rp1,670,356,413,328.46. Pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan sebesar %5.2406, dengan nominal pendapatan yaitu Rp1,757,892,910,553.89. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten

Mage tan dari tahun ke tahun khususnya dari t ahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan.

C. Presentase Rata-rata Rasio Keuangan

Tabel 8. Presentase Rata-rata Rasio Keuangan

No.	Rasio Keuangan	Rat a-rata (%)
1	Derajat Desentralisasi	1 0.8909
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	1 2.3909
3	Rasio Efektivitas PAD	111.7065
4	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	108.0617
5	Pertu mbuhan Pendapatan	4.5818

Sumber: BPP KAD Kabupaten Magetan diolah peneliti (2018)

Berdasarkan tabe l tersebut bisa ditarik kesimpulan terka it dengan kinerja keuangan dari tahun 2015-2017 bahwa derajat desentralisasi di Kabupaten Magetan adalah sebesar 10.8909% maka termasuk ke dalam kriteria kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih kurang, dikar enakan pemerintah daerah Kabupaten Magetan masih belum mampu dalam mengopti malkan PAD. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan presentase 12.3909% atau kurang dari 20%, dengan demikian termasuk ke dalam kategori instruktif. Pola hubungan instruktuf dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya masi h didominasi atau bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah, baik pem erintah pusat maupun pemerintah prov insi. Untuk rasio efektivitas PAD sebes ar 111.7065%, dari presentase tersebut termasuk ke dalam kategori yang sangat efisien. Dengan presentase lebih dari 100% berarti bahwa tingkat pencapaian antara ang garan pada awal tahun dan realisasi pada akhir tahun dalam satu periode bisa dikata kan berhasil atau melebihi target. Efektivita s pendapatan pajak daerah menunjukkan rata- rata sebesar 108.0617%, hal tersebut m enunjukkan bahwa presentase lebih dari 100%, sehingga apa yang telah ditargetk an telah tercapai. Sedangkan untuk rata- rata pertumbuhan pendapatan di Kabupate n Magetan selama tahun 2015-2015 adal ah 4.5818%, hal tersebut berarti dari tahun 2015-2017 pendapatannya cenderung mengalami pertumbuhan dari tahun se belumnya atau bisa dikatakan setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan.

D. Rata-rata Pendapatana n

Tabel 9. Rat a-rata Pendapatan

No.	Uraian	Rata-rata (Rp )
1	Realisasi PAD	180,996,313,156.55
2	Total Pendapatan Daerah	1,657,725,545,814.88
3	Pen dapatan Transfer	1,457,320,465,638.33

Sumber: BP PKAD Kabupaten Magetan diolah peneliti (2018)



**THE 11th FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

Dari tabel 5.7 di atas bisa disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan di Kabupaten Magetan untuk realisasi PAD yang bersumber dari pendapatan pajak daerah,

pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah adalah sebesar Rp180,996,3113,156.55. Rata-rata total pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah adalah Rp1,657,725,545,814.88. Rata-rata pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi adalah sebesar Rp1,457,320,465,638.33.

#### SIMPULAN

Kesimpulan terkait dengan kinerja keuangan dari tahun 2015-2017 bahwa derajat desentralisasi di Kabupaten Magetan adalah sebesar 10.8909% maka termasuk ke dalam kriteria kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih kurang, dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Magetan masih belum mampu dalam mengoptimalkan PAD. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan presentase 12.3909% atau kurang dari 20%, dengan demikian termasuk ke dalam kategori instruktif. Pola hubungan instruktif dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya masih didominasi atau bergantung pada dana yang dihasilkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Untuk rasio efektivitas PAD sebesar 111.706 %, dari presentase tersebut termasuk ke dalam kategori yang sangat efisien. Dengan presentase lebih dari 100% berarti bahwa tingkat pencapaian antara anggaran pada awal tahun dan realisasi pada akhir tahun dalam satu periode bisa dikatakan berhasil atau melebihi target. Efektivitas pendapatan pajak daerah menunjukkan rata-rata sebesar 108.0617%, hal tersebut menunjukkan bahwa presentase lebih dari 100%, sehingga apa yang telah ditargetkan telah tercapai. Sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Magetan selama tahun 2015-2017 adalah 4.5818%, hal tersebut berarti dari tahun 2015-2017 pendapatannya cenderung mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya atau bisa dikatakan setiap tahunnya mengalami peningkatan pendapatan.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah hanya mengukur kinerja keuangan jika dilihat dari derajat desentralisasi, kemandirian, efektivitas PAD dan pajak daerah, serta pertumbuhan pendapatan. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pos pendapatan saja, pada pos belanja tidak dilakukan perhitungan atau analisis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daling, M. (2013). *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA. 1(3):82-89
- Miartana, I.P., & Hardiyasa, I.P. (2016). *Evaluasi Kinerja Rasio-rasio Keuangan Daerah di Provinsi Bali*. Jurnal Manajemen & Bisnis. 13(1):15-27.



THE 11th FIPA  
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP  
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

---

- Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Natalia L., & Astuti T.D. (2015). *Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. *Jurnal Sosio-Humaniora* . 6(1):55-72.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Perspektif Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Pilat, J.J., & Morasa J., (2017). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015*. *Jurnal Accountability*. 6(1):45-55.
- Sugiyono. (2013). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.

